

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Agus Supriadi

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

Arequs@yahoo.com

Based on kepmendiknas 044/U/2002, the school committee carries out four functions, such as giving consideration, supporter, supervisor, and mediator. The function of school committee improving the quality of educational services to the stakeholder is to do their function in school plan and educational resources. Beside that verify and ratify RKAS which is proposed by the school. The school committee's function as the supporter is to give their thought, energy and support in extracurricular and additional lesson. The additional lessons can be done by adding extra time in English. Lesson, natural science and supporting the school budget through from student guardian to fulfill a plenty of educational infrastructures. The function of the school committee as the connector is to assist the school in creating connection an cooperation the school, the student parents and the society, guardians; organize some activates which increase awareness and society partner the last. The function of the school committee as supervisor require the students report; do evaluation of school plan and implementation in infrastructure needs, supervise the development of the school and student progress; do investigation the school funding; control the school works to look for input and suggestion from the society to increase the educational services.

Kata Kunci: komite sekolah, kualitas layanan pendidikan

Pendahuluan

Sekolah merupakan pranata sosial yang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Biasanya diselenggarakan secara masal untuk umum dengan standar kurikulum tertentu pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dikarenakan pendidikan merupakan pranata sosial, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan sebagaimana tertuang dalam paradigma baru tripusat pendidikan dimana semua orang (orang tua dalam keluarga, kepala sekolah dan guru di sekolah serta

masyarakat) bekerjasama mendidik anak-anak dengan baik (Pantjastuti, 2008: 51).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah mengemban empat peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.

Berdasarkan peran komite sekolah tersebut, maka pada tahap awal pembentukannya, komite sekolah disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar

masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite sekolah dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite sekolah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan strategis, yakni (1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) mendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. (Hilman Hidayat, <http://www.smun8.net/>, 2013).

Dinyatakan secara tegas, bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah tidak di bawah kepala sekolah atau di bawah bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah namun, kedudukan komite sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala sekolah.

Berdasarkan kenyataan tersebut, komite sekolah akan bisa melaksanakan perannya secara optimal jika didukung oleh kepala sekolah, yang dimaksudkan dukungan disini adalah kepala sekolah memberikan ruang untuk komite sekolah dalam melaksanakan perannya sehingga akan tercipta hubungan yang sinergis diantara keduanya. Mulyasa mengatakan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, maka kepala sekolah harus melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan untuk menyusun program yang relevan. Disisi lain, masyarakat juga memerlukan jasa sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika kepala sekolah aktif

dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (Mulyasa, 2007: 163).

Dinyatakan secara tegas, bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri dan bersifat independen. Kedudukan komite sekolah tidak di bawah kepala sekolah atau di bawah bayang-bayang kekuasaan kepala sekolah namun, kedudukan komite sekolah adalah sebagai mitra kerja kepala sekolah. Berdasarkan kenyataan tersebut, komite sekolah akan bisa melaksanakan perannya secara optimal jika didukung oleh kepala sekolah, yang dimaksudkan dukungan disini adalah kepala sekolah memberikan ruang untuk komite sekolah dalam melaksanakan perannya sehingga akan tercipta hubungan yang sinergis diantara keduanya. Mulyasa mengatakan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah, maka kepala sekolah harus melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan-masukan untuk menyusun program yang relevan. Disisi lain, masyarakat juga memerlukan jasa sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi, jika kepala sekolah aktif dan dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (Mulyasa, 2007: 163).

Hubungan antara kepala sekolah dengan komite sekolah yang dibangun dengan baik akan membawa pengaruh positif bagi komite sekolah dalam mengadakan sumberdaya-sumberdaya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitas-fasilitas bagi guru-guru dan murid untuk belajar sebanyak mungkin, sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif. Komite sekolah bisa ikut serta untuk meneliti berbagai permasalahan belajar yang dihadapi oleh murid secara kelompok maupun secara individual, sehingga membantu guru-guru untuk menerapkan pendekatan belajar yang tepat bagi murid-muridnya. Komite sekolah juga dapat menyampaikan ketidakpuasan para orang tua murid akan rendahnya prestasi

yang dicapai oleh suatu sekolah. (Suryadi http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/dpk/s/pemberdayaanDPKS.html).

Obyek penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Asembagus. Alasan dipilihnya lembaga pendidikan ini karena peneliti melihat adanya peran komite. Hal itu terlihat dari kontribusi yang telah diberikan oleh komite sekolah yang berupa penambahan aset-aset sekolah dari tahun ketahun, prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh SMP Negeri 1 Asembagus baik di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional yang kesemuanya tidak lepas dari peran serta komite sekolah, maupun program-program kebijakan sekolah yang tidak bisa dipisahkan dari peranan komite sekolah di dalamnya

Fokus penelitian adalah peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan terhadap stakeholder sekolah di SMPN 1 Asembagus Untuk menjawab fokus penelitian tersebut dibutuhkan subfokus yang mempertanyakan mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan terhadap stakeholder sekolah di SMP Negeri 1 Asembagus.

Metode Penelitian

Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (Williams, 1995: 5).

Dalam studi kasus ini peneliti menggunakan penelitian dengan menggunakan studi kasus tunggal. Studi kasus tunggal yang peneliti maksud adalah menyajikan uji kritis suatu teori yang signifikan, dalam rancangan studi kasus tunggal ini, seperti yang diungkapkan oleh

Neal Gross memfokuskan pada sebuah sekolah dalam bukunya *implementing organizational innovations* (1971). Sekolah tersebut dipilih karena memiliki sejarah inovasi (Williams, 1995: 5).

Studi kasus holistik yang penulis maksud adalah berada dalam satu tempat penelitian, analisisnya meliputi Peran Komite dalam Menciptakan kualitas layanan pendidikan terhadap stakeholder Sekolah di SMPN 1 Asembagus dengan menggunakan perspektif empat peran komite Sekolah yakni *advisory, supporting, controlling, dan mediator* yang keempat peran tersebut akan dilakukan di satu tempat yakni di SMPN 1 Asembagus Inilah studi kasus holistik yang penulis maksud

Pembahasan

Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan secara legal formal telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah dikuatkan dengan pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah. Berdasarkan keputusan tersebut, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mawadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan tingkat pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah (Hasbullah, 2006: 90).

Secara terperinci berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut: 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 4) Mediator (*Mediator Agency*) antara pemerintah (*Executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan (Undang-undang Sisdiknas 2003: 122).

Advisory Agency

Peran badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Untuk memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal, dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran, memverifikasi RKAS yang diajukan oleh kepala sekolah, memberikan pengesahan terhadap RKAS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah.

Keberadaan komite sekolah di SMPN 1 Asembagus sangat membantu perkembangan di SMP Negeri 1 Asembagus, komite sekolah ini diibaratkan partner kerja yang memberikan banyak kontribusi kepada sekolah dalam memajukan lembaga misalkan dari segi fisik yang dimaksud adalah sarana dan prasana dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di SMPN 1 Asembagus.

Eksistensi komite sekolah sebagai badan berperan melaksanakan program seperti perencanaan sekolah yaitu memberikan masukan terhadap penyusunan dan pengesahan RKAS, menyelenggarakan rapat RKAS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat) maupun memberikan pertimbangan tentang perubahan RKAS. Yang kedua dalam hal pelaksanaan program, dengan memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan

dan proses pembelajaran kepada para guru. Peran yang ketiga adalah dalam hal pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah serta anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Sebagaimana Peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan misalnya memberikan pertimbangan tentang sumber daya pendidikan yang berasal dari komite, dimana setiap siswa dibebankan iuran komite yang jumlahnya berdeda antara siswa baru dengan siswa yang lanjutan. Untuk siswa baru dibebankan Rp. 450.000,- kelas II sebesar Rp. 300.000,- dan kelas III sebesar Rp. 300.000. Dan Iuran insidental yang diberikan siswa, semua uang itu dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana seperti setiap kelas diberikan LCD dan Kipas Angin beserta perlengkapan di dalam kelas dan begitu juga setiap dua kelas diberikan 1 Wifi. Sedangkan untuk iuran sukarela setiap bulannya sebesar 75.000 bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu dibebani sesuai dengan kemampuannya yaitu 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. Iuran sukarela tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan kegiatan untuk kelas IX diberikan pelajaran tambahan setiap senin sampai kamis jam 05.30 sd 06.30 untuk pemantapan UN. Sedangkan bagi kelas VII dan Kelas VIII penambahan pelajaran seperti bahasa Inggris dan pelajaran eksat. Dan untuk pengembangan pelajaran seperti bahasa Inggris untuk kelas VII komite juga merekomendasi kegiatan ke Pare di Kediri untuk memperdalam bahasa Inggris dan ketika dari Pare bagi kelas VIII mengadakan kegiatan sister school ke SMPN Denpasar I di Bali dan untuk kegiatan eksat seperti

MIPA bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jember (UNEJ).

Komite mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan yang dan memberikan dukungan kepada orang tua siswa, dimana pihak sekolah misalnya ingin menaikkan uang komite sedang kondisi orang tua rata-rata menengah ke bawah, disinilah pihak komite memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah, sepertinya lebih baik uang komite tidak dinaikkan tapi orang tua siswa lancar atau tepat waktu dalam pembayarannya, dan kalau dinaikkan memang anggaran meningkat namun pembayarannya tidak lancar atau macet. Akhirnya pihak sekolah menerima pertimbangan atau masukan yang diberikan Komite Sekolah.

Dalam menentukan perencanaan program-program di sekolah Komite sekolah dalam menentukan program-program sekolah komite SMPN 1 Asembagus tidak membuat sendiri program-program pengembangan sekolah, namun komite SMPN 1 Asembagus menyatakan bahwa program-program yang disusun oleh sekolah secara tidak langsung juga menjadi program-program untuk komite.

Dalam menentukan program di Sekolah komite sekolah memberikan kebebasan kepada kepala SMPN 1 Asembagus karena lebih mengetahui tentang kegiatan-kegiatan atau program-program apa saja yang menjadi prioritas sekolah yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar, tidak berarti komite bersikap pasif atas program-program yang direncanakan oleh SMPN 1 Asembagus dan komite SMPN 1 Asembagus tidak cukup hanya mengetahui dan mensahkan tanpa memberikan usulan terhadap program-program yang sudah direncanakan.

Kenyataan tersebut juga dikuatkan ketika peneliti mengikuti rapat pengesahan (Rancangan Kerja Anggaran Sekolah) RKAS yang dihadiri oleh kepala SMPN 1

Asembagus beserta staf-stafnya, ketua komite SMPN 1 Asembagus sekretaris, bendahara serta satu anggota komite SMPN 1 Asembagus yang lain. Dalam rapat tersebut komite SMPN 1 Asembagus banyak memberikan inisiatif atas program-program yang telah disusun oleh kepala SMPN 1 Asembagus, Namun lebih banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh komite SMPN 1 Asembagus lebih berupa sebagai pemantau atas program-program yang telah diajukan oleh kepala SMPN 1 Asembagus.

Sedangkan peran Komite Sekolah dalam hal pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan, pihak sekolah sedikit lebih terbuka memberikan keleluasaan kepada pihak Komite Sekolah. Hal ini membuktikan masih ada ketidak terbukaan kepala sekolah dalam hal pengelolaan anggaran, dan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah Kota Situbondo melalui Dinas Pendidikan untuk lebih menekankan kepada satuan pendidikan untuk memberikan kebebasan dan keterbukaan dalam segala hal khususnya dalam peningkatan pelayanan pada satuan pendidikan, serta lebih melibatkan lingkungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari hasil temuan peneliti bahwa peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan pertimbangan telah menjalankan perannya dalam perencanaan sekolah dengan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, dan memverifikasi serta mengesahkan RKAS yang diajukan oleh sekolah. Tetapi komite sekolah belum melakukan analisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah, komite sekolah belum menyampaikan masukan, pertimbangan,

dan rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan dinas pendidikan.

Supporting Agency

Peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain dalam bantuan-bantuan berupa pembiayaan sekolah (gedung, sarana, prasarana) lewat Komite Sekolah atau secara langsung perorangan/kelompok. Kemudian penyediaan tempat untuk mendirikan sekolah atau lapangan sekolah dan lain-lain keperluan sekolah. Komite Sekolah mempunyai peran sebagai badan pendukung mempunyai tiga peran yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran.

Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sekolah dan komite sekolah juga harus memahami kondisi sosial ekonomi dari keluarga peserta didik, sehingga dapat menyusun program sekolah secara efektif. Dalam hal pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik komite sekolah melakukan pendataan kepada orang tua/wali murid pada saat rapat komite sekolah dengan orang tua/wali murid pada awal tahun pelajaran.

Komite Sekolah mempunyai peran sebagai badan pendukung mempunyai tiga peran yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Komite Sekolah di SMPN 1 Asembagus selalu terus memantau kondisi ketenagaan pendidikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan kalau ada kekurangan guru bidang studi di sekolah Komite Sekolah ikut mencari dan melihat kemampuannya dulu baru komite menyampaikan kepada kepala sekolah. Sedangkan untuk mengisi tenaga kependidikan non guru seperti pegawai tata usaha harus diketahui komite, sedangkan untuk pelatih atau pembimbing pramuka, palang merah remaja dan kegiatan

tambahan pelajaran diluar jam sekolah serta kegiatan triout yang dilaksanakan lembaga pendidikan lain, itu semua komite sangat dilibatkan.

Sedangkan peran kedua adalah pengelolaan sarana dan prasarana, yang meliputi memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana sekolah. Peran ketiga adalah pengelolaan anggaran memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, komite sekolah memberikan dukungan bantuan sarana dan prasarana sekolah, seperti yang disampaikan Ketua Komite bahwa komite dengan menggalang bantuan dari masyarakat seperti mengadakan fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.

Setiap kegiatan sekolah termasuk pengelolaan anggaran pendidikan Komite Sekolah tetap dikutsertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Bahkan kemajuan sekolah terus meningkat, seperti setiap perlombaan di kabupaten selalu mendapatkan juara bahkan bisa ke propinsi. Dan ini semua didapatkan karena adanya kepedulian masyarakat melalui Komite Sekolah terhadap kemajuan pendidikan di sekolah ini.

Untuk pengadaan pengelolaan sarana dan prasarana komite sekolah terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan sekolah dengan mengadakan perbaikan dan penambahan LCD, serta sarana prasarana, dimana dananya diambil dari masyarakat yang peduli pendidikan, seperti yang dilakukan ketua Komite Sekolah yang sangat peduli terhadap pendidikan. Dan

untuk peran ini Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan misalnya tentang sumber daya pendidikan yang berasal dari komite, dimana setiap siswa dibebankan iuran komite yang jumlahnya berbedanya antara siswa baru dengan siswa yang lanjutan. Untuk siswa baru dibebankan Rp. 450.000,- kelas II sebesar Rp. 300.000,- dan kelas III sebesar Rp. 300.000 dan dibebani setiap bulannya iuran sukarela sebesar 75.000 bagi yang mampu dan 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar.

Peran komite sebagai pendukung dibuktikan dengan adanya Iuran insidental yang diberikan siswa sebesar Rp. 450.000,- kelas II sebesar Rp. 300.000,- dan kelas III sebesar Rp. 300.000 semua uang itu dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana seperti setiap kelas diberikan LCD dan Kipas Angin beserta perlengkapan di dalam kelas dan begitu juga setiap dua kelas diberikan 1 Wifi. Sedangkan untuk iuran sukarela setiap bulannya sebesar 75.000 bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu dibebani sesuai dengan kemampuannya yaitu 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar begitu juga untuk memberikan pelajaran tambahan bagi kelas IX untuk pemantapan UN sedangkan bagi kelas VII dan Kelas VIII untuk penambahan pelajaran seperti bahasa Inggris dan pelajaran MIPA. Dan untuk pengembangan pelajaran seperti bahasa Inggris untuk kelas VII komite juga merekomendasi kegiatan ke Pare di Kediri untuk memperdalam bahasa Inggris dan ketika dari Pare dan setelah dari Pare bagi kelas VIII mereka mengadakan kegiatan sister school ke SMPN Denpasar I di Bali

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan merupakan upaya komite sekolah dalam meningkatkan mutu layanan

pendidikan melalui peran dan fungsi komite sekolah untuk mendukung keterlaksanaan proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, alat dan media pembelajaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar harus terpenuhi dengan baik.

Pendidikan adalah upaya sadar untuk memfasilitasi perkembangan dan peningkatan potensi peserta didik. Inti dari pendidikan adalah kegiatan pembelajaran. Untuk itu perlu adanya program dan dukungan untuk melaksanakannya.

Kegiatan penggalangan dana untuk pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah sangat memperhatikan kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik, hal ini terlihat dengan dilaksanakannya konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dana pendidikan oleh komite sekolah. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah dengan bantuan dari siswa dari keluarga yang lebih mampu, sehingga ada siswa yang membayar 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar. Komite SMPN 1 Asembagus menjalankan perannya sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMPN 1 Asembagus dengan mendukung pelaksanaan kegiatan program sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler serta menerapkan subsidi silang dalam penarikan iuran uang sekolah kepada orang tua siswa.

Peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan pendukung adalah memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan sarana prasarana pendidikan, melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung tidak hanya berupa dukungan dana tetapi juga

sumbangan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Sesuai dengan Kemendiknas Nomor 044/U/ 2002 menyatakan bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai badan pendukung baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (Hasbullah, 2006: 90) Ike Dewi Sartika mengemukakan bahwa: “Kualitas pada dasarnya dapat berupa kemampuan, barang dan pelayanan, kualitas pendidikan dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas hasil (produk). Suatu pendidikan dapat bermutu dari segi proses (yang sudah barang tentu amat dipengaruhi kualitas masukannya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan juga memperoleh pengetahuan yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (*functional knowledge*) yang ditunjang secara wajar oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana).

Berdasarkan temuan penelitian dan ketentuan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa Peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan pendukung dilakukan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, membantu pendanaan sekolah melalui penggalangan dana dari orang tua/wali murid, berupaya memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap dan melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa akan tetapi komite sekolah belum mencari bantuan dana dari dunia usaha/industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu

Mediator

Komite Sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga peran yaitu sebagai penghubung dalam Perencanaan, yaitu menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan, kemudian mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. Dalam hal penghubung dalam perencanaan sekolah, dari pengamatan di lapangan menunjukkan komite sekolah telah melaksanakan perannya artinya setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat itu adalah aspirasi atau keinginan yang muncul dari masyarakat kemudian komite sekolah apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut disampaikan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti dan seterusnya akan dilaksanakan, begitu juga dengan dewan pendidikan, komite sekolah terus melaksanakan hubungan yang baik meskipun sampai saat ini banyak yang diperbuat oleh Dewan Pendidikan untuk pemberdayaan Komite Sekolah di Kota Situbondo khususnya di Asembagus.

Bentuk lain dari komitmen dan tanggungjawab komite sekolah di SMPN 1 Asembagus terhadap peran-perannya adalah dengan turut serta dalam setiap pertemuan wali murid. Mengacu pada perannya, komite SMPN 1 Asembagus selalu dilibatkan sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat. Dalam sebuah rapat pertemuan wali murid yang pernah diikuti peneliti, tampak kepala SMPN 1 Asembagus ketua komite dan bendahara SMPN 1 Asembagus duduk berdampingan di depan menghadap wali murid. Setelah kepala SMPN 1 Asembagus memberikan sambutan dan memberikan penjelasan kepada wali murid terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, selanjutnya menghimbau kepada semua

wali murid hendaknya mendukung program-program yang diadakan sekolah. Setelah itu ketua komite SMPN 1 Asembagus menjelaskan tentang program-program yang sudah disampaikan oleh kepala SMPN 1 Asembagus berikut sejumlah dana yang dibutuhkan oleh sekolah untuk merealisasikan program tersebut.

Bentuk keluhan yang sering disampaikan orang tua siswa adalah masalah pengadaan buku yang terlalu memberatkan orang tua, disini komite sekolah menyampaikan pengaduan ataupun keluhan-keluhan masyarakat (orang tua siswa) tadi kepada kepala sekolah, dimana yang memberatkan orang tua siswa tadi adalah pembayarannya terlalu singkat misalnya guru memberikan tengat waktu cuma tiga kali bayar, pihak Komite Sekolah memohon kepada kepala sekolah untuk diberikan kelonggaran pembayaran uang insidental untuk kelas VII sebesar 450.000, kelas VIII 300.000 dan Kelas IX sebesar 300.000 tersebut dari tiga kali menjadi enam kali atau satu semester dan begitu juga bagi orang tua yang tidak mampu untuk membayar uang insidental meminta keringan untuk membayar sesuai dengan kemampuannya yaitu 25%, 50%, 75% dari jumlah iuran dana pendidikan bahkan ada juga yang dibebaskan dari kewajiban membayar dan kepala sekolah dapat menerima keluhan masyarakat tadi.

Sebagaimana yang terjadi dalam setiap pertemuan wali murid jika membahas masalah dana tentu saja ada proses tawar menawar antara sekolah dan wali murid. Selama proses tawar menawar tersebut yang memimpin adalah ketua dan bendahara komite SMPN 1 Asembagus. Sementara kepala SMPN 1 Asembagus hanya sesekali berbicara untuk menjelaskan dan melihat pada proses pertemuan wali murid yang sangat teratur seolah memberikan gambaran bahwa sebelum diadakan pertemuan dengan wali murid, komite SMPN 1 Asembagus dengan kepala SMPN 1 Asembagus telah

melakukan koordinasi untuk saling berbagi tugas, sehingga ketika rapat telah dimulai masing-masing pihak telah mengerti tentang tugas-tugasnya yang bisa dinyatakan bahwa kepala sekolah bertugas untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan sekolah, sementara komite sekolah bertugas untuk menjelaskan besarnya dana yang dibutuhkan oleh sekolah.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah sangat diharapkan mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bentuk seperti; orang tua dan masyarakat membantu menyediakan fasilitas pendidikan, memberikan bantuan dana serta pemikiran atau sumbang saran yang diperlukan untuk kemajuan sekolah. Peran orang tua dan masyarakat di dalam memberikan informasi kepada sekolah tentang potensi yang dimiliki anaknya serta memupuk pengertian orang tua dan masyarakat tentang program pendidikan yang sedang diperlukan oleh masyarakat, karena tanpa bantuan masyarakat sekolah tidak akan bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

Peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan mediator adalah: menjadi penghubung antara masyarakat dengan sekolah, membantu sekolah dalam mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah, menyampaikan aspirasi masyarakat dalam usulan membuat kebijakan.

Berdasarkan Kemendiknas Nomor 044/U/2002 bahwa komite memiliki peran sebagai mediator (*mediating agency*) merupakan peran untuk menghubungkan antara sekolah dengan masyarakat dan pemerintah. Bentuk pelaksanaan peran ini melalui sinergi antara program sekolah dengan program-program yang ada di masyarakat dan pemerintah, mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Pihak-

pihak yang dapat diajak bekerja sama oleh sekolah antara lain:

1. Warga masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama) baik secara individu maupun secara organisasi.
2. Alumni
3. Instansi terkait lainnya, seperti sekolah lain, puskesmas, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain.
4. Orang tua siswa (Hasbullah, 2006: 90)

Kerjasama dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan atau secara insidentil sesuai dengan keperluan. Peran komite sekolah sebagai badan penghubung merupakan salah satu peran sentral untuk menjalin sinergi yang harmonis antara sekolah dengan *stakeholder* pendidikan dalam mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan penghubung sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih ada kekurangan antara kerjasama komite sekolah dengan alumni, dunia usaha/dunia industri belum berjalan dengan baik.

Controlling

Komite sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga peran, pertama berperan sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, dengan mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan/kualitas program dan proses perencanaan pendidikan di sekolah.

Komite mempunyai peran sebagai pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite setiap saat, memantau proses belajar siswa apa perlu diadakan pelajaran tambahan, memantau keadaan siswa yang patut dibantu. Komite juga memantau kegiatan ekstrakurikuler siswa,

seperti kegiatan osis, pramuka dan palang merah remaja.

Namun fakta berbicara lain, bahwa komite SMPN 1 Asembagus tidak memiliki ruang kerja tersendiri, walaupun demikian hal tersebut tidak mengganggu eksistensi komite SMPN 1 Asembagus untuk menjalankan perannya sebagai pengontrol (*controlling*) di SMPN 1 Asembagus, meski sebelumnya pada awal pembentukan komite SMPN 1 Asembagus, kepala SMPN 1 Asembagus telah menyediakan ruang kerja bagi komite sekolah, akan tetapi sejak tahun 2010 ruang kerja komite sekolah yang letaknya bersebelahan dengan ruang kepala sekolah difungsikan sebagai ruang RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) SMPN 1 Asembagus kebijakan itu diambil juga atas keputusan antara komite SMPN 1 Asembagus dan kepala SMPN 1 Asembagus, alasan yang dipilih dikarenakan jaranganya komite SMPN 1 Asembagus berkunjung ke sekolah sehingga ruangan tersebut menimbulkan kesan tak berpenghuni.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kepala SMPN 1 Asembagus memberikan fasilitas bagi keberlangsungan komite SMPN 1 Asembagus, namun dikarenakan sesi kunjungan yang dilakukan oleh komite SMPN 1 Asembagus frekuensinya terhitung jarang, sehingga kepala SMPN 1 Asembagus meminta izin kepada ketua komite SMPN 1 Asembagus untuk menggunakan ruang kerja yang semestinya dipakai komite SMPN 1 Asembagus difungsikan sebagai Ruang RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) tanpa mengenyampingkan eksistensi komite SMPN 1 Asembagus. Permintaan izin kepala SMPN 1 Asembagus terhadap komite SMPN 1 Asembagus dalam hal ini disampaikan kepada ketua komite SMPN 1 Asembagus merupakan upaya untuk saling menghargai sesama mitra kerja. Sebab secara struktural kedudukan komite sekolah dan kepala sekolah disebut dengan hubungan lateral, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arni,

hubungan lateral adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang berada dalam jenjang yang sama. (Arni, 2005: 80).

Oleh karena itu antara kepala sekolah dan ketua komite harus bisa bersikap normatif yakni selalu menjaga norma, etika, dan aturan dalam hubungan tata kerja. Dan hal ini menurut Suhaman dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan serasi antar pribadi.

Ketiadaan ruang kerja bagi komite SMPN 1 Asembagus tidak menyurutkan komitmen untuk menjadi mitra kerja bagi kepala sekolah. Sebab dalam kunjungan-kunjungan berikutnya, komite SMPN 1 Asembagus langsung menuju ruang kepala SMPN 1 Asembagus untuk bertatap muka dengan kepala sekolah secara langsung. Secara teoritis, kunjungan dengan bertatap muka seperti ini efektif untuk tetap menjaga hubungan agar tetap harmonis, secara psikologis juga akan mempererat ikatan batin antar personal. Dengan suasana yang penuh keakraban itu juga akan memudahkan kedua belah pihak untuk saling terbuka membagi informasi maupun menjamin pemahaman yang sama.

Komite sekolah mempunyai peran sebagai memantau pelaksanaan program sekolah, dengan organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah memantau sumber daya pelaksana program dan memantau partisipasi stake holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Dalam kajian peneliti tentang komite Sekolah dalam pengawasan terhadap sumber daya pelaksana program sekolah, hanya berbentuk saran kepada kepala sekolah, sedangkan dalam pengawasan terhadap proses belajar mengajar komite sekolah tidak pernah. Kemudian dalam memberikan saran tentang proses belajar mengajar seperti menyarankan guru lebih melibatkan siswa secara aktif dalam

pelajaran di kelas atau menyarankan untuk memperbanyak tugas di rumah, Komite Sekolah juga tidak pernah karena menurut beliau itu sudah terlalu maju dan bukan wewenang komite.

Komite Sekolah di SMPN 1 Asembagus selaku badan pengontrol tetap melaksanakan pengawasan seperti mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, memantau organisasi sekolah, memantau alokasi anggaran meskipun pelaksanaannya tidak secara rutin, namun komite sekolah tetap melaksanakannya

Monitoring adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan program untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi serta penyimpangan yang mungkin terjadi. Sedangkan evaluasi adalah proses mendapatkan informasi untuk mengetahui keberhasilan sebuah program berdasarkan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk perbaikan program yang sedang berlangsung serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan program dan keuangan sekolah. Sebagai badan pengawas, komite SMPN 1 Asembagus melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program kerja sekolah, meminta penjabaran kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat.

Kemendiknas Nomor 044/U/ 2002 menyatakan bahwa komite sekolah dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan pendidikan, melakukan pemantauan terhadap anggaran dan pelaksanaan program-program sekolah serta pemantauan *output* sekolah untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan (Toha, 2008: 91).

Berdasarkan peran badan pengawas komite SMPN 1 Asembagus secara umum telah berjalan dengan baik, dengan dibuktikan laporan komite sekolah kepada

sekolah dilakukan dengan secara tertulis tentang hasil pengamatan komite sekolah terhadap sekolah. Peran ini dipahami oleh pengurus komite sekolah sehingga peran komite sekolah sebagai badan pengawas akan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Monitoring dan evaluasi mencakup input, proses, output dan outcome. Komponen input mencakup: kurikulum, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, organisasi, pembiayaan, manajemen sekolah, dan peranserta masyarakat. Komponen proses mencakup: proses manajerial, proses belajar mengajar. Komponen output mencakup: prestasi akademik dan prestasi nonakademik. Komponen outcome mencakup semua dampak pelaksanaan program baik terhadap individu maupun sosial.

Monitoring harus dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah program dilaksanakan secara tuntas. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal dan disusun laporannya.

Faktor Pendukung

Secara konseptual, keberadaan komite sekolah memang cukup kuat karena dasar hukumnya telah termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2003. Komite sekolah merupakan badan mandiri untuk mewedahi peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Secara empiris, saling keterikatan antara sekolah, keluarga dan masyarakat juga dapat dirasakan kepentingannya. Sekolah tidak akan mampu menanggulangi masalah kenakalan anak yang mungkin terjadi di sekolah tanpa melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat (Undang-undang Sisdiknas 2003: 122).

Komite sekolah menjadi wahana pemersatu pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan namun diperlukan usaha-usaha yang kuat untuk mewujudkannya.

Sebagai organisasi masyarakat yang bersinggungan langsung dengan sekolah, komite SMPN 1 Asembagus diharapkan dapat bekerja secara efektif, hal itu akan terwujud jika ada komitmen dan tanggung jawab antar anggota yang ada dalam organisasi tersebut. Eksistensi SMPN 1 Asembagus tidak luput dari peran komite SMPN 1 Asembagus yang pengurus dan anggota-anggotanya mempunyai persamaan visi dan misi. Meskipun komite sekolah ini merupakan organisasi *non profit* yang berarti mereka (pengurus dan anggota) tidak mendapatkan gaji namun semangat juang yang tinggi dalam bidang pendidikan yang mereka miliki tidak menyurutkan niatan mereka untuk tetap mewujudkan cita-cita agar SMPN 1 Asembagus menjadi sekolah yang unggul dan bisa dibanggakan di dunia pendidikan.

Komite SMPN 1 Asembagus tidak hanya sebagai formalitas dan sebagai legitimator bagi program-program yang diajukan oleh kepala SMPN 1 Asembagus, terbukti hingga saat ini kepala SMPN 1 Asembagus tetap selalu berdiskusi terhadap komite SMPN 1 Asembagus dalam rapat-rapat maupun dalam pertemuan dengan wali murid. Sebaliknya dengan sangat terbuka komite SMPN 1 Asembagus berupaya untuk membantu dan memposisikan diri sebagai mitra kepala SMPN 1 Asembagus dengan sebaik-baiknya. Kenyataan itu tentu saja karena adanya kekuatan personal masing-masing pengurus dan anggota-anggota komite SMPN 1 Asembagus ini yang terdiri orang-orang yang sangat peduli dengan dunia pendidikan. Kondisi itulah yang kemudian menimbulkan rasa saling melengkapi dan saling pengertian antara anggota yang satu

dengan anggota yang lainnya. itu yang mengokohkan keberadaan komite SMPN 1 Asebagus untuk mencapai tujuan bersama. Hal itu sebagaimana teori yang diungkapkan oleh Herman, (2007) bahwa: organisasi dicirikan oleh perilakunya yang terarah pada tujuan. Tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai lebih efisien dan efektif melalui tindakan-tindakan individu dan kelompok yang diselenggarakan dengan suatu persetujuan bersama.

Keharmonisan hubungan komite SMPN 1 Asebagus dengan kepala SMPN 1 Asebagus yang menyebabkan eksisnya komite SMPN 1 Asebagus hingga saat ini menunjukkan adanya komunikasi yang terus terjalin antara komite SMPN 1 Asebagus dengan kepala SMPN 1 Asebagus. Keharmonisan tersebut dikarenakan adanya komunikasi yang senantiasa terjalin antara komite SMPN 1 Asebagus dengan kepala SMPN 1 Asebagus yang lebih banyak dilakukan oleh ketua komite SMPN 1 Asebagus dengan kepala SMPN 1 Asebagus.. Komunikasi yang dibangun oleh ketua komite dan kepala SMPN 1 Asebagus tidak terbatas pada komunikasi-komunikasi formal saja, namun berlanjut pada komunikasi non formal baik melalui telfon ataupun kunjungan-kunjungan silaturahmi diantara keduanya. Hal itu sesuai dengan teori Arni tentang metode komunikasi horisontal yaitu melalui percakapan telepon. Karena pada masa sekarang tiap-tiap organisasi umumnya mempunyai telepon maka pemberian informasi di antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya dapat dilakukan melalui percakapan telepon. Dalam kenyataannya telepon dapat mempercepat dengan anggota lain yang tempat kerjanya berjauhan. Dan juga melalui aktivitas sosial, menurut Arni di dalam suatu organisasi biasanya ada kelompok-kelompok untuk rekreasi, olahraga, kegiatan sosial dan sebagainya. Kelompok-kelompok

ini mengembangkan komunikasi horisontal dalam organisasi (Muhammad, 2005: 80).

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa peran komite SMPN 1 Asebagus di dalam menentukan program-program di sekolah dikarenakan adanya kekuatan personal yang disertai dengan rasa saling pengertian satu dengan yang lainnya sehingga tetap berusaha melahirkan komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikan visi dan misi SMPN 1 Asebagus. Kekuatan personal pengurus dan anggota komite SMPN 1 Asebagus jika dibersatukan akan memunculkan idealisme baru bagi komite sekolah untuk tetap turut serta dalam keberlangsungan pendidikan. Dari hubungan yang harmonis tersebut pada tahun 2010 komite SMPN 1 Asebagus dianugerahi penghargaan sebagai komite terbaik tingkat nasional.

Kesimpulan

Advisory Agency. Peran komite SMPN 1 Asebagus sebagai badan pertimbangan telah menjalankan perannya dalam perencanaan sekolah dengan melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan dan kegiatan sekolah, dan memverifikasi serta mengesahkan RKAS yang diajukan oleh sekolah.

Supporting Agency. Peran komite SMPN 1 Asebagus sebagai badan pendukung dilakukan dengan ikut memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, memberi dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, penambahan pelajaran siswa untuk kelas IX pemantapan UN dan kelas VII dan VIII memberikan tambahan pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran MIPA dan membantu pendanaan sekolah melalui penggalangan

dana dari orang tua/wali murid, berupaya memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Mediator Agency. Peran komite SMPN 1 Asembagus sebagai badan penghubung adalah membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua/wali murid dan masyarakat, mengadakan rapat atau pertemuan dengan kepala sekolah, dewan guru atau orang tua/wali murid dan masyarakat, mengadakan kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan kemitraan masyarakat.

Controlling Agency. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol di SMPN 1 Asembagus adalah meminta penjabaran tentang hasil belajar siswa, melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, mengawasi perkembangan peserta didik/kemajuan sekolah, melakukan pemeriksaan keuangan sekolah, mengontrol kinerja sekolah mencari masukan dan saran dari masyarakat untuk peningkatan layanan pendidikan.

Faktor yang mendukung eksistensi komite SMPN 1 Asembagus sehingga tetap eksis di SMPN 1 Asembagus adalah kekuatan personal yang dimiliki anggota komite SMPN 1 Asembagus yang juga melahirkan rasa saling mengerti dan memahami akan kondisi masing-masing sehingga menimbulkan sebuah idealisme baru untuk turut terlibat dalam mengembangkan pendidikan di SMPN 1 Asembagus

Daftar Pustaka

- Aziz, A. (1998). *Memahami fenomena sosial melalui studi kasus: kumpulan materi pelatihan metode kualitatif*. Surabaya: BMPTSI Wilayah VII Jawa Timur.
- Danim, S. (2006). *Visi baru manajemen sekolah; dari unit birokrasi ke lembaga akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Williams, D dalam Moeleong, L. J. (1995). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi pendidikan; kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Milles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, A. (2005). *Komunikasi organisasi*. Jakarta: Bumi Askasara.
- Mulyasa, E. (2007). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yin, R. K. (2002). *Case study research design and methods*. Edisi Bahasa Indonesia oleh Djauzi Muzakir, *Studi kasus desain dan metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyandi, H. & Garniwa, I. (2007). *Perilaku organisasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miftah, T. (2008). *Organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas. (2003). *Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, A. (2012). *Dewan pendidikan dan komite sekolah; mewujudkan sekolah-sekolah yang mandiri dan otonom*, http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/dpks/pemberdayaanDPKS.html, diakses tanggal 2 Januari 2012.
- Hidayat, H. (2013). <http://www.smun8.net/index.php?>, diakses tanggal 5 Januari 2012.